

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menggunakan sistem perwakilan yang dipilih untuk menampung aspirasi masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Proses keterwakilan tersebut diselenggarakan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, dimana masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan Legislatif. Pada pemilihan Legislatif masyarakat memilih calon yang mewakili daerahnya. Sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu selalu terdapat dukungan elite politik maupun kelompok kepentingan yang ada untuk memperoleh suara di setiap daerah pilihan. Walaupun begitu selalu terdapat actor politik yang awalnya sudah memiliki figure kepemimpinan dengan sikap yang kompeten, aspiratif, berdedikasi dan legitimate.

Pada pencalonan anggota legislatif, para kandidat membutuhkan dukungan partai politik dimana pada proses kandidasi, partai politik memiliki hak untuk memilih para kandidat yang dirasa dapat menguntungkannya pada perolehan kursi di Lembaga Legislatif. Proses kandidasi, partai politik akan memilih beberapa calon untuk syarat keterwakilan perempuan dalam Legislatif (Wasi, 2020). Namun selalu terdapat keuntungan tersendiri untuk kandidat yang dari awalnya sudah memiliki jaringan kuat di dalam partai maupun dengan actor politik. Selain dari rekomendasi partai politik tentu kandidat harus memiliki banyak dukungan dari para elite politik sebelumnya yang sudah menjadi petahana dalam pemilihan umum. Kelompok pendukung inilah yang kemudian akan menjadi jaringan politik yang kuat untuk membantu para kandidat masuk atau mendapatkan kursi di Legislatif (Wasi, 2020).

Jaringan politik dianggap penting pada saat kampanye berlangsung untuk memobilisasi massa dimana terdapat banyak cara calon Legislatif dalam melakukan kampanye diantaranya dengan menggunakan banner, billboard, pamphlet, orasi hingga media social pribadi mereka. Namun apabila calon Legislatif yang mencalonkan diri di Kabupaten yang masyarakatnya masih banyak yang konvensional maka mereka akan mendekatkan diri dengan terjun langsung, orasi, billboard, banner hingga door to door untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Tentu saja pada proses kampanye calon Legislatif tersebut menggunakan jaringan politik local mereka untuk melakukan mobilisasi massa mulai dari organisasi, komunitas, hingga orang kuat local yang berpengaruh pada setiap daerah.

Salah satu cara dalam memobilisasi massa yang dapat meningkatkan elektabilitas hingga kepopuleran calon Legislatif pada saat kampanye adalah melalui jaringan actor politik satu dan lainnya maupun menggunakan figure petahana untuk membangun dan menggiring opini public yang sudah memiliki nama politik tersendiri dihadapan masyarakat. Selain itu mobilisasi politik dapat dilakukan oleh instrument non-partai politik untuk mendukung kepentingan electoral, karena diketahui bahwa partai politik dalam kontribusinya di kampanye dirasa sangat rendah sehingga partai politik hanya berperan sebagai kendaraan politik calon Legislatif untuk mendapatkan rekomendasi. Mobilisasi politik nonpartai ini dirasa efektif dalam menggerakkan massa dibanding dengan menggunakan instrument partai politik (Nugroho, 2011). Kelompok relawan maupun kelompok non-partai ini seringkali terdiri dari kaum millennial maupun petinggi agama yang memahami politik dan memutuskan untuk mendukung salah satu calon Legislatif. Pada saat kampanye calon Legislatif berlangsung, mobilisasi politik non-partai ini mudah untuk mendapatkan massa karena mereka memiliki jaringan dengan kelompok maupun organisasi lain yang memiliki pemikiran yang sama untuk memilih calon Legislatif tersebut.

Pada penelitian ini penulis ingin menganalisis adanya mobilisasi politik elektoral berbasis jaringan keluarga Nasha Barcelona Marheinis sebagai calon Legislatif 2019 di Kabupaten Blitar serta pemanfaatan mobilisasi politik berbasis keluarga Nasha Barcelona terhadap partai politik saat pencalonan legislatif. Dimana Kabupaten Blitar sangat menarik dan terkenal dengan basis massa PDIP. Dalam dunia politik hampir DPRD Kabupatem Blitar selalu dimenangkan oleh PDIP sebagai pemegang kursi terbanyak disetiap pemilu berlangsung. Hal ini tidak terlepas dari para actor politik PDIP dan para petahana yang berjuang untuk memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten Blitar. Dengan banyaknya perolehan kursi di DPRD Kabupaten Blitar maka dapat dikatakan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan kepada PDIP sebagai partai yang menampung aspirasi masyarakat.

Nasha Barcelona Marheinis merupakan seorang perempuan yang sebelumnya berprofesi sebagai wirausaha (kosmetik, tas, dan pakaian) dan digolongkan sebagai kaum millennial karena pada saat mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten Blitar Fraksi PDIP umurnya masih 26 tahun dan menjadi yang termuda dari kandidat lainnya. Pada saat mencalonkan diri untuk pertama kalinya sebagai calon Legislatif PDIP Nasha Barcelona hanya memiliki pengalaman di organisasi PDIP, PAC yang berada di Kecamatan Talun selama 2 tahun lamanya, yang mana awal karir politik Nasha di PAC ini bermula pada tahun 2016-2018. Dua tahun sebelum mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif.

Hal tersebut memang sudah direncanakan keluarganya terutama ayahnya mempersiapkan Nasha Barcelona untuk maju sebagai calon Legislatif Kabupaten Blitar sehingga sebelum pemilu berlangsung Nasha Barcelona sudah masuk dalam PAC PDIP Kecamatan Talun untuk mempermudah dia mendapatkan rekomendasi partai dan memiliki nomor urut saat pemilu berlangsung. Dengan pengasuhan politik yang dilakukan ayahnya menempatkan kedua ibu Nasha Barcelona sebagai Kepala Desa serta kemudian memasukkan anak pertama perempuannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar. Dengan kesiapannya tersebut Nasha Barcelona berhasil mendapatkan nomor urut 2 atau awal untuk mendapatkan posisi strategis di pemilu. Kemudahan mendapatkan rekomendasi partai dan nomor urut pencoblosan tidak lepas dari peran ayahnya yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Blitar serta merangkap sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar. Dengan begitu Nasha Barcelona memiliki power dalam ranah eksekutif hingga partai politik. Pada fenomena Nasha Barcelona dapat dilihat bahwa Nasha memanfaatkan jejaring politiknya yang mana menghubungkan actor politik, kelompok kepentingan, partai politik dan petahana dalam pencalonannya.

Selain dukungan dari ayahnya yang merupakan petahana PDIP, Nasha Barcelona juga mengutamakan sasarannya kepada kaum millennial ataupun pemilih pemula dimana dia memiliki kepopuleran tersendiri dalam media social. Dalam media social Nasha Barcelona sangat populer untuk kalangan remaja dan mama muda karena parasnya yang cantik, pintar serta mandiri secara finansial yang terlihat di media sosial. Hal tersebut didukung karena followers di media sosialnya terutama Instagram mencapai 16.000 pengikut. Nasha Barcelona mencalonkan diri sebagai kandidat Legislatif pada Daerah Pilihan 4 (Blitar 4) Kabupaten Blitar yang wilayahnya mencakup 4 Kecamatan yaitu Talun, Selopuro, Garum dan Gandusari. Dapil 4 tersebut menjadi fokus kampanye Nasha Barcelona untuk memperoleh suara dari masyarakat.

Nasha yang berasal dari Kecamatan Talun dimana semua masyarakat Talun sudah mengetahui bahwa Nasha Barcelona merupakan putri pertama dari Wakil Bupati (Marheinis Urip Widodo) Kabupaten Blitar serta Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar. Bapak Marheinis Urip Widodo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati yang merupakan petahana dari PDIP yang sebelumnya sudah menjabat berkali-kali sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar mulai dari tahun 1998. Serta Ibu kandungnya (Bu Halla) yang menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Bendosewu tempat tinggalnya dan Ibu keduanya (Bu Fendriana) juga merupakan Kepala Desa di Wonorejo yang bertetangga dengan Ibu kandungnya. Dalam kemenangan suara yang diperoleh oleh Nasha Barcelona

tentu merupakan hasil dari kekuatan politik yang dimiliki oleh orang tuanya yang sedang menjabat sebagai elite politik ataupun petahana di desa tempat tinggalnya. Perolehan suara yang diraih oleh Nasha Barcelona berjumlah 20.722 suara dari Daerah Pilihan 4 (Blitar 4) yang terdiri dari 4 Kecamatan tersebut. Terutama Kecamatan Talun Nasha Barcelona berhasil mengantongi sebanyak 16.056 suara yang mana Nasha Barcelona sudah aman dalam batas minimal mendapatkan kursi di anggota Legislatif. Serta tertinggi se-Kabupaten Blitar hingga terbanyak se-Jawa Timur pada kategori pilihan Legislatif DPRD Kabupaten atau Kota 2019.

Kemenangan perolehan suara Nasha Barcelona merupakan hasil kepopulerannya sebagai anak dari elite dan petahana politik serta tim sukses yang berusaha untuk mendapatkan suara dari masyarakat agar memilih Nasha Barcelona. Pada kampanyenya Nasha Barcelona menekankan pada seluruh umur yang memiliki hak pilih terutama kaum muda atau pemilih pemula dan komunitas agama yang mana di Kabupaten Blitar masih kental dengan kegiatan keagamaan serta merupakan kandang dari massa PDIP. Dengan memanfaatkan mobilisasi politik electoral keluarganya Nasha Barcelona dengan mudah di kenal sebagai anak dari petahana PDIP yang mana semua orang sudah mengenal orang tuanya terutama ayahnya (Marheinis) sejak menjabat sebagai DPRD hingga Wakil Bupati Kabupaten Blitar.

Penelitian ini berfokus pada mobilisasi politik electoral keluarga Nasha Barcelona yang mana anggota keluarganya masuk dalam dunia politik yang dapat memperkuat posisi ataupun elektabilitas Nasha Barcelona dalam mendapatkan perolehan suara terbanyak di antara kandidat-kandidat lainnya. Selain itu penulis ingin mengkaji peran partai politik dalam membantu para kandidatnya maju pada pemilu, karena diketahui Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar adalah ayah Nasha Barcelona. Dengan peran ayahnya (Marheinis) sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, PDIP berhasil mendapatkan jatah kursi anggota legislative sebanyak 19 kursi. Yang sebelumnya pada pemilu 2014 PDIP mendapatkan jatah kursi sebanyak 13 naik menjadi 19 kursi, dimana 6 kursi yang termasuk di dalamnya adalah Nasha Barcelona. Dengan begitu pada pemilu 2019 PDIP berhasil mendominasi kursi pada DPRD Kabupaten Blitar. 19 kursi tersebut hanya terdapat 3 perempuan dan salah satunya adalah Nasha Barcelona dengan perolehan suara tertinggi.

Pada penelitian ini apakah partai memiliki peran besar dalam kemenangan maupun kontribusinya dalam pencalonan ataupun hanya sebagai kendaraan politik dalam mendukung kadernya. Serta manfaat dari jejaring politik keluarga Nasha Barcelona kepada partai politik. Diketahui bahwa partai politik sering kali tidak bekerja secara efektif untuk mendukung kadernya terutama saat kampanye berlangsung, ataupun hanya sebagai formalitas politik persyaratan Calon Legislatif. Kemudian di daerah tempat tinggal Nasha Barcelona Desa Bendosewu PDIP mendapatkan perolehan sebesar 2.342 suara yang mana Kepala Desa dari Desa Bendosewu tersebut adalah Ibu kandung (Bu Halla) Nasha Barcelona, dan di daerah tempat tinggal Ibu keduanya (Bu Fendriana) yang merupakan Kepala Desa dari Desa Wonorejo, PDIP memperoleh sebesar 1.993 suara.

Perolehan Nasha Barcelona di Desa tempat tinggal kedua ibunya yaitu di Desa Bendosewu dan Desa Wonorejo memperoleh suara tertinggi, seperti yang terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.1.1

Perolehan Suara Nasha Barcelona di Desa Bendosewu (Ibu Pertama Nasha Barcelona)

TPS	Perolehan Suara
TPS 1	20
TPS 2	52
TPS 3	86
TPS 4	89
TPS 5	81
TPS 6	87
TPS 7	115
TPS 8	124
TPS 9	113
TPS 10	85
TPS 11	91
TPS 12	133
TPS 13	118
TPS 14	116
TPS 15	176
TPS 16	162
TPS 17	168
TPS 18	70
TPS 19	66
TPS 20	104
TPS 21	58
TPS 22	76
Total Keseluruhan TPS 1-22	2.190 suara

(Sumber : KPU Kabupaten Blitar)

Di Desa Bendosewu tempat tinggal Ibu kandung atau pertama (Bu Halla) Nasha Barcelona memperoleh 2.190 suara dari 22 TPS di desa tempat tinggalnya, yang mana tempat tinggal Nasha Barcelona beserta keluarganya berada di TPS 15 dengan perolehan terbanyak yaitu 176 suara.

Tabel 1.1.2**Perolehan Suara Nasha Barcelona di Desa Wonorejo (Ibu Kedua Nasha Barcelona)**

TPS	Perolehan Suara
TPS 1	93
TPS 2	75
TPS 3	22
TPS 4	84
TPS 5	107
TPS 6	100
TPS 7	129
TPS 8	102
TPS 9	125
TPS 10	161
TPS 11	89
TPS 12	112
TPS 13	159
TPS 14	103
TPS 15	112
TPS 16	88
TPS 17	102
TPS 18	27
Total Keseluruhan TPS 1-18	1.790 suara

(Sumber : KPU Kabupaten Blitar)

Di Desa Wonorejo tempat tinggal Ibu keduanya, Nasha Barcelona memperoleh 1.790 suara dari 18 TPS yang tertinggi di desa tersebut yang mana ibu keduanya (Bu Fendriana) berada di TPS 13 dengan jumlah perolehan 159 suara yang memilih Nasha Barcelona. Dari dua desa (Bendosewu dan Wonorejo) di satu Kecamatan Talun yang mana tempat tinggal kedua Ibunya, Nasha Barcelona mengantongi total keseluruhan 3.980 suara, belum lagi dari desa lainnya yang berada di Kecamatan Talun. Perolehan suara Nasha Barcelona tersebut memperlihatkan bahwa mobilisasi electoral Nasha cenderung mengandalkan factor keluarga, terutama kedua ibunya (Bu Halla dan Bu Fendriana) merupakan kepala Desa Bendosewu dan Wonorejo dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) serta ayahnya (Marheinis) yang saat itu merupakan Wakil Bupati Kabupaten Blitar (2015-2020). Massa dari kedua desa tersebut tentu sudah mengetahui bahwa Nasha Barcelona merupakan anak dari elite politik (Wakil Bupati dan Kepala

Desa) yang ada di Kabupaten Blitar yang tentu saja massa tersebut juga merupakan massa dari kedua orang tuanya. Peran jaringan keluarga Nasha tersebut dijadikan mobilisasi electoral untuk mendapatkan dukungan pemilih.

Mobilisasi politik yang dilakukan keluarga Nasha tersebut dengan memobilisasi para komunitas agama islam, hindu, buddha, Kristen dan katolik serta memobilisasi para perangkat desa, Kepala Desa dan RT RW yang berada di dalam lingkup terkecil desa. Hal tersebut digunakan untuk memobilisasi para massa dari Kepala Desa dan RT RW untuk memilih Nasha Barcelona. Hal tersebut tentu mudah dilakukan oleh kedua orang tuanya yang merupakan Kepala Desa dan Wakil Bupati saat itu. Dengan pengasuhan politik yang dilakukan kedua orang tuanya, membuat anaknya masuk dalam dunia politik seperti mereka. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan kekausaan keluarga Nasha Barcelona dalam pemerintahan. Selain itu tim sukses yang berada di Dapil 4 merupakan para jejaring kerabat kedua orang tua Nasha, tak kecuali para keluarga dekat dan kerabat jauh yang berada di desa-desa Dapil 4. Dengan adanya jejaring kekerabatan yang dimiliki Nasha Barcelona di setiap kecamatan Dapil 4 membuat dirinya lebih mudah untuk melakukan kampanye dan memobilisasi massa untuk memilih dirinya.

Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan factor keluarga sebagai mesin mobilisasi electoral menarik untuk dijadikan tema skripsi karena fenomena tersebut menggambarkan bahwa terjadi penggunaan mobilisasi electoral berbasis keluarga selain menggunakan jaringan formalitas partai. Berdasarkan argument tersebut problem penelitian ini adalah bagaimana Nasha Barcelona memanfaatkan factor keluarga sebagai mesin mobilisasi politik electoral.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Nasha Barcelona memanfaatkan mobilisasi politik electoral berbasis keluarga untuk memperkuat elektabilitas pada pencalonan Legislatif pada pemilu 2019?
2. Bagaimana Implikasi dari jejaring keluarga Nasha Barcelona terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Nasha Barcelona memanfaatkan mobilisasi politik electoral berbasis keluarga dalam maju pada Pilihan Legislatif 2019.
2. Untuk mengetahui implikasi jejaring keluarga Nasha Barcelona terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah berbagai wawasan maupun pengetahuan untuk para peneliti dalam hal mobilisasi politik electoral berbasis keluarga pada pemilu Legislatif 2019 Nasha Barcelona serta menambah literatur dan bahan kajian dalam studi Ilmu Politik.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian tersebut dapat memberikan manfaat maupun pembelajaran untuk mahasiswa maupun para peneliti mengenai peran keluarga yang berprofesi sebagai elite politik dalam mobilisasi politik electoral Nasha Barcelona yang mendukungnya maju di pemilu Legislatif 2019.

1.5 Konseptualisasi

1.5.1 Mobilisasi Politik

Mobilisasi sebagai sebuah hubungan social pada dua actor yaitu partai dan individu, yang mana terdapat tiga proses aktivitas mobilisasi yaitu proses pembentukan komunitas (dimensi afektif), proses kepentingan (dimensi kognitif), dan proses pemanfaatan instrument (Mufti, 2016). Mobilisasi politik merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat dengan jumlah banyak (massa) untuk suatu tujuan tertentu dengan ajakan maupun dorongan dari orang lain (Huntington & Nelson, 1994). Mobilisasi politik merupakan suatu usaha actor dalam mempengaruhi jalannya kekuasaan yang mana di suatu kekuasaan terdapat pihak bukan oposisi dan oposisi. Terdapat dua model dalam mobilisasi politik yaitu mobilisasi vertikal dan horizontal. Mobilisasi vertikal bekerja secara vertikal dimana hubungan terjalin secara vertikal. Kedua, mobilisasi horizontal yang mana segala proses-proses internal di dalam mobilisasi berlangsung secara horizontal seperti hubungan antara individu dan partai (Mufti, 2016).

Dengan begitu maka mobilisasi dapat berjalan setidaknya lebih dari seseorang dari berbagai pihak maupun kelompok kepentingan (Niven, 2004). Dengan perumpamaan si A adalah individu atau kelompok kepentingan dan si B adalah partisipan politik dan C merupakan hasil dari mobilisasi politik. Maka si A dapat mempengaruhi si B untuk memobilisasi mereka menghasilkan tujuan yang merupakan C. Maka dari itu apabila si B melakukan perintah dari si A maka si A berhasil mempengaruhi si B untuk memilih kandidat yang di usung si A. Dari hal tersebut maka B merupakan partisipasi politik yang dimobilisasikan oleh si A untuk mencapai tujuan.

1.5.2 Mobilisasi Elektoral Berbasis Keluarga

Menurut Haboddin (2015) mobilisasi electoral berbasis keluarga merupakan transfer kekuasaan yang dilakukan dari suami ke istri, dan dari ayah kepada para putra maupun putrinya. Keberhasilan transfer kekuasaan yang dilakukan petahana kepada istri, anak, maupun adik salah satu strategi mempertahankan kekuasaan keluarga dalam pengelolaan birokrasi. Hal tersebut sering kali disebut sebagai rezim keluarga di saat pemilihan umum maupun pilkada berlangsung. Politik kekerabatan merupakan praktik pendistribusian kekuasaan di ranah keluarga yang masih sedarah (Haboddin, 2015).

Upaya petahana atau penguasa meletakkan keluarga maupun kerabat pada jabatan-jabatan tertentu yang dianggap strategis bertujuan untuk membangun dinasti

politik dalam pemerintahan entah tingkat local maupun nasional (pusat). Hal tersebut dilakukan untuk saling menjaga dan kekal dalam kekuasaan, selain itu bertujuan untuk mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan para keluarga penguasa tersebut (Agustinus, 2010). Mengadopsi pendapat Haboddin (2015) maka dapat dirumuskan tiga variable mobilisasi berbasis electoral berpusat pada keluarga :

Pertama, kandidat bergantung pencalonannya pada keluarga. Hal ini merupakan modal jejaring keluarga untuk anak maupun sanak saudara yang mencalonkan diri dibandingkan dengan kandidat yang pertama kali mencalonkan diri tanpa memiliki relasi keluarga dalam politik. Kedua, menggunakan jaringan kekuasaan non formal berpusat pada keluarga seperti suami istri, sebagai instrument pencalonan. Ketiga, kekuatan jaringan SDM berpusat pada keluarga sehingga mesin partai minim dalam proses pencalonan.

1.5.2 Jejaring Politik

Menurut Knoke (1989) jejaring politik merupakan unit dasar dari setiap sistem politik yang kompleks yang meliputi peran ataupun posisi actor dalam menjalin hubungan social serta koneksi ataupun hubungan dengan actor lain berdasarkan situasi yang sedang terjadi. Hubungan tersebut terjalin sesuai dengan perilaku dan kualitas seseorang saat berinteraksi dengan actor lain sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Untuk setiap individu yang merupakan actor politik yang mengikuti kontestasi dan memiliki jejaring politik, tentu mereka memiliki aturan ataupun norma perilaku tersendiri untuk dipatuhi. Lebih tepatnya setiap actor dalam hubungan atau institusi tertentu memiliki tingkatan atau ranah yang berbeda. Ada actor politik yang memiliki tingkatan tinggi atau sering kali disebut petahana yang memiliki pengaruh dan peranan yang kuat sehingga mendapatkan perhatian dari actor-aktor lainnya yang berada di bawahnya ataupun saingannya.

Peran actor sebaiknya dilihat dari cara mereka berinteraksi dengan actor lain, untuk melihat keterkaitan yang mereka miliki, karena tidak hanya keterkaitan secara tunggal ataupun ganda namun bervariasi sesuai dengan dimensi frekuensi, intensitas, durasi, konten atau lainnya (Knoke, 1989). Interaksi social antar kelompok akan terus berubah dalam posisi jaringan social yang dapat mengubah peran, entah peran lama yang diubah atau peran baru yang muncul untuk memimpin (Knoke, 1989). Hal terpenting dalam jaringan politik adalah bagaimana cara memperoleh kekuatan atau dukungan yang

ada dalam masyarakat. Sehingga dapat terbukti bahwa dukungan yang kuat berasal dari sebuah jaringan politik.

1.5.3 Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi yang memiliki kegiatan yang saling berkesinambungan dalam arti masa hidup partai politik tidak bergantung dengan masa hidup para pemimpin ataupun masa jabatannya, organisasi yang permanen dan bersifat terbuka mulai dari tingkat local hingga di tingkat pusat (Surbakti, 2010). Partai politik merupakan sekelompok warga negara otonom yang memiliki tujuan dalam pencalonan dan bersaing dalam pemilihan umum dengan harapan mendapatkan kekuasaan dan control pemerintahan melalui organisasi pemerintahan dan penguasaan jabatan public (Robert Huckshom, 1984). Partai politik adalah orang-orang yang berusaha mengontrol aparat pemerintah dengan bersaing merebut jabatan dalam pemilihan umum, orang-orang tersebut merupakan tim yang berisi koalisi yang anggotanya menyetujui semua tujuan mereka bukan hanya sebagai tujuan (Anthony Downs, 1957)

Partai politik memiliki tujuan untuk membawa pemimpin ataupun anggota partai yang menang dalam pemilu untuk berkuasa dan mendapatkan dukungan yang diperoleh saat menjabat di pemerintahan. Partai politik yang sudah berakar kuat di masyarakat diharapkan dapat mengendalikan pemerintahan sehingga terbentuk suatu pola hubungan antara masyarakat dengan pemerintah berdasarkan kewenangan dan legitimasi yang sah (Surbakti, 2010 : 145). Pada dasarnya partai politik terbuka secara umum untuk setiap anggota masyarakat yang ingin mendapatkan rekomendasi partai untuk mencalonkan diri sebagai elite politik. Seperti pada tahap kandidasi, partai politik memiliki kuasa penuh untuk merekrut calon kandidat yang akan mewakili partai pada kontestasi politik. Dalam melakukan fungsinya partai politik melakukan tiga kegiatan yaitu seleksi calon kandidat, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan eksekutif atau Legislatif (Surbakti, 2010).

Partai politik memainkan peran yang penting dan unik pada sistem pemerintahan demokrasi. Partai memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara padu pada sistem pemerintahan yang memungkinkan terpilihnya sebagian besar pejabat public. mereka menyatukan berbagai kelompok yang tercerai berai menjadi satu kekuatan, penghubung diantara tingkatan yang berbeda-beda, serta menjamin adanya kesinambungan yang berlangsung melebihi masa jabatan. Partai berperan penting dalam

meningkatkan partisipasi aktif dalam politik, mendorong debat maupun diskusi mengenai isu-isu terbaru dan menuntut para politisi bertanggung jawab atas tindakan atau kebijakan yang mereka buat (Katz & Crotty, 2018).

Setiap partai memiliki visi, misi, ideologi dan tata cara yang berbeda dalam melakukan perekrutan kandidat. Persaingan politik menjadi salah satu konsep yang sangat penting saat ini dalam mendapatkan kekuasaan di pemerintahan (Firmanzah, 2011). Adanya kejelasan ideologis partai dapat membantu partai dalam menyaring kandidat yang sesuai dengan ideologi partai, persamaan kepentingan, serta pandangan yang sama saat mereka menjabat sebagai Legislatif. Dengan ideologis yang jelas dan perekrutan yang jelas tentu akan mengurangi adanya “loncat-loncatan” partai yang dilakukan para politisi (Firmanzah, 2011). Partai politik merupakan suatu organisasi yang berperan dalam mencetak pemimpin atau politisi yang berwawasan luas dan berkualitas, perlu suatu proses pendidikan baik formal maupun informal yang dapat membentuk suatu karakter pemimpin, pada dasarnya dalam membentuk karakter pemimpin yang berkualitas partai politiklah yang bertanggung jawab secara penuh dalam menyeleksi para kandidat tersebut (Firmanzah, 2011). Sistem kaderisasi perlu disertai dengan sistem yang transparan dimana terdapat jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi, secara transparan dan sehat pada tubuh organisasi partai politik (Firmanzah, 2011).

1.5.4 Pemilu Legislatif

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Legislatif merupakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat yang kelak akan bertugas dan menduduki kursi Legislatif sebagai wakil rakyat. Siapa saja yang akan duduk di kursi Legislatif tersebut merupakan hasil dari kemenangannya di Pilihan Legislatif yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di pemerintahan (Ghea, 2015). Persaingan calon

anggota Legislatif tidak hanya terjadi di pemilu Legislatif yang setiap calon kandidat harus bersaing dengan kandidat lain dari partai yang berbeda namun juga terjadi di partai politik yang sama.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1 Mobilisasi Politik

Penelitian ini mengarah pada bagaimana Nasha Barcelona membangun serta memanfaatkan mobilisasi electoral berbasis keluarga dalam meningkatkan elektabilitas yang membuatnya menang mendapatkan suara terbanyak dan kursi di DPRD. Maka dari itu peneliti menggunakan teori mobilisasi politik untuk mengetahui pola mobilisasi yang dilakukan keluarganya dalam mendukung Nasha Barcelona maju pada pilihan Legislatif. Mobilisasi politik merupakan suatu aktivitas atau kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat dengan jumlah yang banyak (massa) untuk suatu tujuan tertentu dengan ajakan atau dorongan dari orang lain. Yang mana mobilisasi politik sering kali terjadi pada saat pemilu ataupun pilkada berlangsung untuk dijadikan strategi mendapatkan suara ataupun kekuasaan di pemerintahan. Tujuan utama mobilisasi politik adalah mengatasi serta mengimbangi oposisi atau golongan yang bersikap aktif tidak efektif maupun pasif serta menjadi salah satu upaya untuk mencari dukungan dengan memperluas partisipasi politik (Huntington & Nelson, 1994:3). Selanjutnya dalam menjalankan mobilisasi terdapat dua kategori mobilisasi politik yaitu: (Nugroho, 2011).

1. Mobilisasi langsung, yaitu mobilisasi dalam bentuk pengerahan masyarakat pemilih untuk melakukan tindakan politik sesuai dengan yang dikehendaknya.
2. Mobilisasi tidak langsung, yaitu mobilisasi dengan mempengaruhi cara pandang dan pikiran para pemilih, dengan begitu para pemilih dapat membuat keputusan politik berdasarkan dengan pemahaman mereka.

Mobilisasi langsung dilakukan dengan cara memberikan instruksi kepada para pemilih secara langsung. Seperti kampanye, dan sosialisasi berhadapan langsung terhadap pemilih untuk mendapatkan dukungan. Sedangkan mobilisasi tidak langsung dengan memanfaatkan beberapa media social, banner, billboard, maupun seminar untuk mempengaruhi cara pandang dan berpikir para pemilih. Dari dua kategori mobilisasi tersebut kegiatan kampanye merupakan kegiatan terpenting untuk meningkatkan partisipasi local masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan dua kategori mobilisasi langsung dan tidak langsung untuk menunjang elektabilitas calon kandidat di hadapan masyarakat. Mobilisasi langsung maupun tidak langsung ini sebenarnya bertujuan memberikan informasi kepada para pemilih secara positif yang mengarah kepada para kandidat yang

mencalonkan diri untuk meningkatkan jumlah pemilih. Pemberian informasi ini merupakan salah satu cara untuk membangun persepsi masyarakat pemilih terhadap kandidat yang mencalonkan diri tersebut.

Sehingga mobilisasi massa yang dilakukan oleh keluarga Nasha Barcelona jelas terlihat dalam mendukung anaknya memperoleh suara terbanyak pada saat Pilihan Legislatif berlangsung terutama di wilayah Desa tempat tinggal kedua ibunya yang mana ayahnya merupakan petahana PDIP yang menjabat sebagai Wakil Bupati, dan kedua ibunya merupakan Kepala Desa di tempat tinggalnya. Terutama untuk Kecamatan Talun yang merupakan basis atau kandang dari PDIP petahana Marheinis Urip Widodo ayah dari Nasha Barcelona yang sudah memiliki massa dari saat Marheinis menjabat sebagai DPRD Kabupaten Blitar. Sehingga dengan mudah kedua orang tuanya melakukan mobilisasi politik kepada masyarakatnya untuk mendukung anaknya maju dan menang sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Mobilisasi politik akan mengarah pada partisipasi politik pemilih. Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan tujuan mempengaruhi jalannya kebijakan atau keputusan pemerintah (Huntington & Nelson, 1994:5). Partisipasi politik merupakan orientasi dari warganegara terhadap kegiatan politik maupun perilaku politik yang nyata (Huntington & Nelson, 1994:5). Karena partisipasi politik pemilih merupakan salah satu dari bentuk demokrasi yang sehat suatu negara. Pada dasarnya partisipasi politik dalam sistem politik yang kompetitif dan demokrasi selalu mengandung unsur manipulasi dan tekanan, begitu pula dengan partisipasi politik yang otonom dan dimobilisasikan yang memiliki prinsip tajam secara realitas (Huntington & Nelson, 1994). Namun walaupun begitu selalu terdapat campuran partisipasi politik yang otonom dan yang dimobilisasikan pada sistem politik, walaupun selalu terdapat perbedaan campuran pada setiap sistem sesuai dengan perjalanan waktu.

Pada dasarnya terdapat hubungan antara kedua kategori tersebut partisipasi yang dimobilisasikan dan yang otonom, perilaku yang awalnya partisipasi yang dimobilisasikan dapat menjadi diinternasionalisasikan yang pada umumnya merupakan otonom, sebaliknya pun begitu partisipasi yang awalnya otonom dapat menjadi partisipasi yang dimobilisasikan maupun dimanipulasikan (Huntington & Nelson, 1994). Kedua kategori tersebut memiliki konsekuensi penting bagi sistem politik, baik partisipasi yang dimobilisasikan ataupun yang otonom terdapat peluang untuk pemimpinnya ataupun menimbulkan kekangan untuk para pemimpin politik. Pemimpin yang memiliki massa besar dan dapat memobilisasikan pendukungnya mempunyai posisi

yang tinggi atau tingkatan yang berbeda dengan pemimpin politik yang tidak dapat melakukan mobilisasi terhadap massanya. Dengan hal ini kedudukan pemimpin politik yang dapat menggerakkan dukungan yang dimobilisasikan dengan yang otonom memiliki kedudukan atau tingkatan tinggi dalam sistem politik dibanding dengan pemimpin politik lainnya yang tidak dapat menggerakkan dukungan dengan dua kategori partisipasi tersebut (Huntington & Nelson, 1994).

Maka dari itu mobilisasi politik sangat perlu dilakukan dalam mendapatkan dukungan politik. Dengan memaksimalkan mobilisasi politik tersebut maka kemungkinan keberhasilan dalam mendapatkan dukungan juga semakin besar. Mobilisasi politik sering kali digunakan oleh beberapa kelompok untuk memenangkan suatu calon kandidat. Dimana mobilisasi politik merupakan salah satu cara untuk merekrut kelompok maupun individu dengan tujuan mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik. Dengan adanya pemberian informasi dan komunikasi yang baik pada masyarakat meningkatkan jumlah partisipasi pemilih, sehingga dengan begitu dapat memanfaatkan partisipasi pemilih untuk memobilisasi massa. Komunikasi partai sudah bukan menjadi acuan untuk keberhasilan mobilisasi, terutama dengan pemilih yang berada diluar jangkauan organisasi (Parry, Barth, Kropf, Jones, 2007).

Terlebih dengan kampanye yang dilakukan para kandidat, dimana harus memilih para partisipan yang jelas akan memberikan suaranya pada pemilu. Bukan sekedar masyarakat yang masih ragu akan memberikan suaranya. Dalam hal ini kampanye akan mengarah pada mobilisasi politik dengan bertujuan memetakan pemilih yang akan benar-benar berpartisipasi saat pemilu berlangsung (Niven, 2004). Selain itu mobilisasi akan berkurang risikonya dengan menargetkan kelompok-kelompok inti yang benar-benar akan berpartisipasi. Sehingga kelompok-kelompok tersebut akan mudah untuk dimobilisasi karena perilaku mereka dipengaruhi oleh partisipasi (Niven, 2004).

Terlebih lagi dengan mobilisasi langsung yang dilakukan oleh komunitas-komunitas terpilih. Kandidat dapat langsung melakukan kunjungan kepada anggota komunitas untuk menyampaikan informasi yang sudah menjadi target mereka. Dengan artian kunjungan langsung akan lebih menarik dibanding dengan iklan banner dan billboard yang terpampang di jalanan (Niven, 2004). Dengan adanya kegiatan secara langsung yang didatangi oleh kandidat terhadap kelompok kepentingan tersebut membuat para anggota mengajak masyarakat lain untuk ikut mendatangi kegiatan tersebut. Hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat lainnya untuk bergabung dan memilih salah satu kandidat. Dengan begitu maka mobilisasi dapat berjalan tidak hanya

melalui satu orang namun berbagai pihak dari kelompok kepentingan. Keterlibatan relawan atau komunitas dalam memobilisasi massa dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu : (Niven, 2004)

1. Mobilisasi kepada masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk memilih
2. Mobilisasi yang dilakukan oleh individu yang sebelumnya sudah saling mengenal dengan pemilih
3. Mobilisasi melalui anggota dari komunitas atau kelompok yang sama
4. Mobilisasi yang dilakukan lebih dari satu hubungan individu lainnya, atau saling mempengaruhi dan ajakan.

Dari empat aspek tersebut menjadi gambaran untuk komunitas pendukung dalam memaksimalkan perannya dalam memenangkan calon kandidat. Mobilisasi juga akan lebih mudah berjalan apabila tersusun sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut tentu mengacu pada kegiatan kelompok ataupun individu pada saat pemilihan umum berlangsung dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat pemilih untuk memenangkan calon kandidat sebagai upaya mobilisasi politik pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Organisasi ataupun mobilitas politik memiliki penawaran dan jalan yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula, mulai dari pelibatan dan usaha individu maupun tindakan kolektif. Bagi beberapa masyarakat mobilitas merupakan jalan perubahan dalam status social setiap individu, namun bukan berarti perubahan pola partisipasi politik kelompok maupun individu (Huntington & Nelson, 1994).

Seperti mobilisasi pemilu di Amerika Serikat, orang Amerika tidak memiliki keaktifan dalam politik. Pada tahun 2000, terdapat upaya pembujukan seseorang untuk memilih dengan persentase 35%. Sekitar 11% menggunakan pin untuk kampanye pada badan, mobil, serta halaman rumah mereka, 11% dengan menggunakan kontribusi calon kandidat, partai, ataupun komunitas social lainnya untuk bekerja sama dengan kandidat yang mencalonkan diri, 5% dengan menghadiri berbagai pertemuan dan rapat umum politik, dan 3% melakukan pekerjaan atas nama calon maupun partai. Banyaknya waktu, energi, pendapatan, dan tingkat keinginan interpersonal membuat tidak banyak orang yang ingin melakukannya. Sejak tahun 1980 penduduk Amerika Serikat memberikan jumlah suara untuk pemilihan presiden sebesar 55% dari populasi usia memilih (Endersby, Petrocik, & Shaw). Dalam hal ini penduduk Amerika memiliki tingkat partisipan yang tergolong rendah mengenai urusan public, selain itu dalam meningkatkan minat penduduk untuk aktif dalam pemilu, partai maupun kepengurusan cenderung tidak berbuat banyak untuk menarik simpatik masyarakat yang ingin memberikan suaranya

dari angka 55-60% lebih (Powell, 1982; Teixeira 1992, McDonald dan Popkin, 2001). Sehingga mobilisasi dan peranan survei pemilih menjadi penting dalam mempromosikan seseorang untuk memberikan suaranya.

Kampanye di Amerika sering kali tidak banyak mempengaruhi jumlah perolehan suara, yang mana mobilisasi yang dilakukan sebagai pembentuk suatu arah suara, dengan asumsi bahwa perolehan suara masyarakat akan mencapai khasnya tersendiri dari total pemilih keseluruhan serta untuk memenangkan pemilu dengan berpusat pada kalangan pemilih yang sudah di targetkan sebelumnya. Namun hal tersebut tidak tentu memberikan perolehan suara sesuai dengan target yang di tetapkan karena bagaimanapun jumlah pemberi suara cenderung tidak konsisten, dan hal itu tidak terbantahkan. Pada pola pemilih dan non pemilih sering kali mobilisasi di gerakkan kepada pemilih yang sudah jelas akan menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan umum berlangsung, hal inilah yang membuat partisipan tidak konsisten. Dimana banyak terjadi hal yang tidak terduga seperti non pemilih yang kemudian memiliki ketertarikan untuk menggunakan hak suaranya, hal tersebut berdasarkan pada kekuatan yang mempengaruhi mereka. Pertarungan politik yang sengit sering kali meningkatkan persentase dari jumlah perolehan suara normal menjadi naik. Kekuatan jangka pendek yang dapat meningkatkan kepercayaan non pemilih menjadi pemilih sangat bermanfaat untuk mendukung calon. Sehingga perolehan suara menjadi tidak berimbang seperti peningkatan perolehan suara yang melebihi tingkat normal karena peningkatan partisipan dari non pemilih (Endersby, Petrocik, & Shaw).

Berbagai jenis mobilisasi dapat dilakukan oleh calon kandidat mulai dengan mobilisasi pekerja, mobilisasi agama, mobilisasi jarak kota atau desa, mobilisasi ras, hingga mobilisasi sikap individu. Jumlah pemberi suara bermacam-macam seperti halnya jenis pekerjaan yang juga mempengaruhi tingkat pemilihan masyarakat, seperti pada negara-negara yang memiliki tradisi patronase, persentase perolehan suara lebih tinggi dibanding warga negara lainnya. Berbeda lagi dengan pengangguran, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Selain dari jenis pekerjaan, mobilisasi yang sering kali dilakukan terutama di Indonesia adalah mobilisasi komunitas agama, yang mana memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mendapatkan dukungan untuk kandidat yang mencalonkan diri. Seringnya masyarakat yang ikut bergabung dalam kegiatan keagamaan akan memiliki tingkat partisipan politik yang tinggi. Kemudian dalam mobilisasi jarak kota atau jarak tempuh rumah ke TPS juga memiliki pengaruh dalam perolehan suara, dimana pendatang baru dengan 6 bulan atau kurang memiliki tingkat

partisipasi yang cukup dibanding dengan masyarakat yang sudah lama tinggal di daerah tersebut lebih memiliki partisipasi tinggi. Masyarakat yang jarak rumahnya dengan TPS dekat maka akan dengan mudah mencapai lokasi sehingga tingkat partisipasi mereka tinggi dibanding mereka yang bertempat tinggal jauh dari TPS (Gimpel et J, 2004). Perbedaan demografis juga dirasa penting karena dapat membentuk sikap yang merupakan pengaruh langsung untuk individu pemilih. Mereka yang tertarik dengan pemilu akan memberikan suaranya sedangkan individu yang tidak tertarik maka tidak akan memberikan suara mereka (Endersby, Petrocik, & Shaw).

Terdapat dua kategori pemilih yaitu terdaftar secara kelompok dan individu yang mendaftar sendiri karena ingin memilih. Mereka yang mendaftar sendiri benar-benar memenuhi syarat dan benar-benar memberikan suaranya. Sedangkan masyarakat yang terdaftar secara kelompok kurang tertarik dalam memberikan suara, pemberian suara dikarenakan adanya tekanan eksternal, karena memberikan hak suara mereka bukan dari kebiasaan mereka (Gerber et al, 2003; Green dan Shachar, 2000; Plutzer, 2002). Selain itu mobilisasi masyarakat tidak terlepas dari dana kampanye yang dibutuhkan kandidat untuk menarik simpatik masyarakat yang mana mendatangkan masyarakat ke TPS untuk memberikan suaranya memiliki insentif yang kuat dari setiap partai (Endersby, Petrocik, & Shaw). Selain itu pada saat pemilihan presiden berlangsung gabungan koalisi sangat membantu untuk meningkatkan perolehan suara karena setiap partai memiliki massa sendiri di setiap daerah.

Koalisi partai mengacu pada banyaknya dukungan dari berbagai komunitas tertentu dan pendukung partai homogen dalam kelas, etnis, agama atau tempat tinggal. Persekutuan maksimal adalah pendukung dari setiap partai berasal dari satu agama, dengan begitu anggota agama tertentu akan mendukung partai yang sama. Sedangkan partai yang tidak berkoalisi, menarik dukungan masyarakat dengan cara yang sama untuk semua agama sesuai dengan jumlah proporsional mereka di masyarakat (Endersby, Petrocik, & Shaw). Mobilisasi pemilih yang potensial dirasa penting untuk meningkatkan perolehan suara, seperti pada tiga dimensi kampanye yang menciptakan positivitas calon, kesadaran calon, dan menghadirkan pemilih ke TPS. Hal tersebut tentu dapat dilihat dari upaya tim sukses dan dana kampanye yang telah dikeluarkan kandidat (Endersby, Petrocik, & Shaw). Misal kampanye untuk memobilisasi pemilih tentu lebih besar persentase dana yang dikeluarkan dibanding kampanye pengenalan nama maupun bujukan atas pemilih (Endersby, Petrocik, & Shaw).

Partai politik merupakan salah satu instrument mobilisasi politik dimana peran partai politik dalam memobilisasi masyarakat untuk memilih kandidat ataupun partai politik tertentu. Sehingga partai politik memiliki peran dalam membantu para kandidatnya meraih simpati dari masyarakat terutama dengan partai-partai besar atau yang sudah menjadi petahana di suatu daerah. Partai politik merupakan suatu organisasi public yang memiliki tujuan membawa pemimpin atau kandidatnya berkuasa dalam pemerintahan dan memungkinkan para politisi lainnya mendapatkan dukungan atau keuntungan yang diperoleh (Firmanzah, 2011:67). Seperti pada tahap kandidasi dimana partai politik memiliki kuasa penuh dalam perekrutan kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai perwakilan partai.

Selain hal tersebut partai politik memiliki berbagai kegiatan dalam memperoleh kekuasaan di pemerintahan salah satunya melalui berbagai kegiatan mobilisasi politik yang terorganisir pada partai politik, massa dapat dipengaruhi menjadi pemilih partisan. Partai politik merupakan proses dari mobilisasi politik yang digunakan untuk kepentingan pencalonan kandidat datang dan berasal (Nugroho, 2011). Di berbagai negara berkembang, partai politik menjadi peran kunci dalam melakukan aktivitas mobilisasi politik terutama saat pemerintah atau suatu actor politik dihadapi oleh kekuatan oposisi. Pada pemerintahan yang berkuasa atau partai politik yang memiliki kekuatan besar sebagai sarana mobilisasi politik hal tersebut dapat digunakan untuk meredam kekuatan oposisi. Sedangkan pihak oposisi sebagai alat transfer kekuasaan memiliki arti sebagai alat resistensi terhadap pemerintahan yang berkuasa (Nugroho, 2011).

Dalam perspektif tersebut partai politik merupakan salah satu instrument mobilisasi yang utama dalam mencapai tujuan-tujuan yang bersifat electoral. Kehadiran partai politik dalam kelembagaan sebagai aksi mobilisasi politik dan instrument pembentukan sikap dari para pemilih terlepas dari berbagai masalah oposisi maupun bukan oposisi. Untuk mencapai kerangka kelembagaan terdapat dua hal yang harus dipenuhi oleh partai politik yaitu pertama, memiliki kemampuan keorganisasian dalam mengendalikan berbagai sumber dukungan yang tersedia secara permanen. Kedua, memiliki kemampuan organisasi yang adaptif dan responsive dalam perkembangan situasi eksternal tanpa mengganggu stabilitas internal lainnya. Saat partai politik dapat mewujudkan dua hal tersebut maka partai politik harus dapat mengembangkan diri sebagai organisasi politik dengan tingkat kelembagaan politik yang tinggi (Nugroho, 2011).

Dari mobilisasi politik yang ada di Amerika dengan di Indonesia ada beberapa kesamaan seperti halnya mobilisasi pada beberapa komunitas seperti komunitas agama yang digunakan politisi Indonesia yang mana memiliki pengaruh besar dalam perolehan suara Nasha Barcelona serta golongan kaum millennial. Dimana kaum millennial yang mengenal Nasha Barcelona selain dari anak Wakil Bupati saat itu, juga mengetahui melalui media sosialnya yaitu Instagram. Selain dari berbagai billboard, banner dan pamphlet yang terpasang di beberapa jalan besar yang ada di Dapil 4. Nasha juga memanfaatkan media social untuk mempromosikan dirinya kepada para pengikutnya yang berjumlah kurang lebih 16.000, dimana banyak kaum millennial yang memfollow dirinya. Dengan begitu semakin banyak orang yang mengenal Nasha Barcelona mencalonkan diri sebagai Kandidat PDIP pada Pilihan Legislatif 2019. Dengan menggunakan komunitas agama sebagai mobilisasi massa, partai politik (PDIP Kabupaten Blitar) juga turut serta dalam mendukung kandidatnya dengan mengarahkan kandidat-kandidatnya mendekatkan diri pada berbagai komunitas agama. Mulai dari komunitas agama islam, Kristen, buddha dan hindu yang berada di Kabupaten Blitar terutama untuk Nasha Barcelona di Daerah Pilihan 4.

1.7 Metode penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Berpusat kepada anggota DPRD Nasha Barcelona dalam meningkatkan elektabilitasnya pada saat pilihan Legislatif, yang mana diketahui bahwa Nasha Barcelona hanya memiliki pengalaman 2 tahun di PAC PDIP Kecamatan Talun. Pemilu 2019 merupakan pertama kalinya Nasha Barcelona maju sebagai calon Legislatif PDIP dengan perolehan suara terbanyak di Kabupaten hingga Provinsi. Perolehan suara Nasha tersebut tidak lepas dari pemanfaatan mobilisasi politik electoral keluarganya yang mana kedua orang tuanya merupakan elite politik di Kabupaten Blitar. Terutama Nasha Barcelona mencalonkan diri di Dapil 4 yang merupakan kandang dari massa petahana PDIP ayahnya sendiri yaitu Marheinis Urip Widodo. Pada Dapil 4 di Kecamatan Talun hampir semua masyarakat mengetahui bahwa Nasha Barcelona merupakan anak pertama dari petahana PDIP dan kedua ibunya yaitu Bu Halla dan Bu Fendriana merupakan Kepala Desa Bendosewu dan Wonorejo di tempat tinggalnya. Perolehan suara Nasha di dua desa (Bendosewu dan Wonorejo) tempat tinggal ibunya memperoleh suara tinggi di banding calon kandidat lainnya atau hampir seluruh suara di peroleh oleh Nasha.

Maka dari itu penulis ingin mengetahui seberapa besar kekuatan politik keluarga Nasha Barcelona dalam meningkatkan elektabilitas anaknya saat maju sebagai calon Legislatif PDIP yang mana untuk Dapil 4 sudah tidak asing lagi saat menyebut nama ayah Nasha Barcelona “Marheinis”, sehingga hampir seluruh masyarakat pasti mengenalnya. Tidak hanya itu penulis ingin mengetahui bagaimana Nasha Barcelona memilih memanfaatkan basis mobilisasi politik keluarga dan peran partai politik dalam mengusung Nasha sebagai kandidat PDIP yang mana pasti dengan mudah Nasha meminta rekomendasi dari PDIP karena ayahnya (Marheinis) merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, dimana tidak luput dari kata lobbying kepada kepengurusan partai yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten hingga pusat. Seberapa jauh interaksi yang dibuat oleh Nasha Barcelona kepada masyarakat Dapil 4, hingga masyarakat memberikan suaranya kepada Nasha Barcelona alih-alih anak dari petahana PDIP dan Kepala Desa.

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif merupakan metode ilmiah untuk memahami, mengungkapkan, dan menginformasikan fenomena yang sedang diteliti (Aminah & Roikan, 2019). Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai penelitian yang penelitiannya melakukan wawancara sebagai pewawancara ataupun pengamat secara langsung dalam mengumpulkan data tentang tema atau permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena ingin mengetahui secara mendalam peran keluarga Nasha dalam meningkatkan elektabilitasnya saat maju sebagai calon Legislatif 2019 dengan menggunakan berbagai jaringan politiknya yang dengan mudah Nasha dikenal oleh masyarakat dan mendapatkan hak pilih masyarakat untuk memilihnya.

Dimana dengan menggunakan metode kualitatif dapat menemukan hal-hal baru yang sekiranya belum ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Diharapkan dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat melakukan wawancara kepada informan yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai permasalahan yang diteliti dan menjadi pengalaman berharga untuk mengetahui bagaimana mobilisasi politik keluarga Nasha Barcelona dalam mendukungnya maju sebagai calon legislatif, serta peran partai politik dalam pencalonan Nasha Barcelona.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Terkait dengan lokasi penelitian sesuai dengan judul yang diambil Mobilisasi Politik Elektoral Berbasis Jaringan Keluarga : Studi Kasus Nasha Barcelona Marheinis Pada Pilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Blitar. Maka penelitian dilaksanakan di Kabupaten Blitar terutama Dapil 4 yaitu Kecamatan Talun tempat tinggal Nasha Barcelona, Kecamatan Garum, Selopuro dan Gandusari. Kecamatan Talun yang merupakan tempat tinggal Nasha Barcelona beserta kedua orang tuanya yang hanya berbeda Desa begitu pula dengan Kecamatan Gandusari yang merupakan tempat tinggal keluarga suaminya merupakan alasan Nasha Barcelona memilih Dapil 4 yang dengan mudah memanfaatkan jaringan keluarganya untuk memobilisasi massa di dua Kecamatan tersebut. Kecamatan Talun yang merupakan basis massa PDIP dimana ayahnya Marheinis yang sejak dulu selalu memilih Kecamatan Talun untuk Dapil pemilunya membuat masyarakat dengan mudah mengenal Nasha. Kemenangan Nasha dengan latar belakang keluarga elite politik menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya penelitian ini. Selain itu, adanya beberapa akses dirasa cukup untuk membantu peneliti dalam melakukan wawancara dan pengumpulan data pada penelitian ini.

1.7.4 Subyek Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara jelas dan sesuai dengan harapan peneliti. Pemilihan informan penelitian ini berdasarkan dengan permasalahan yang diambil, dimana memiliki keterkaitan dengan judul dan permasalahan peneliti. Sehingga diharapkan dengan mudah untuk mendapatkan informasi sebaik-baiknya. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti harus memahami dan mendengarkan opini dari informan tanpa adanya kata benar atau salah saat melakukan wawancara.

Peneliti memutuskan untuk memilih 3 informan untuk wawancara pengumpulan data yaitu :

1. Nasha Barcelona Marheinis (Anggota DPRD Fraksi PDIP)

Merupakan anak dari politisi Marheinis yang menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Blitar pada saat itu dan kedua ibunya yang merupakan Kepala Desa Bendosewu dan Wonorejo. Nasha Barcelona merupakan seorang perempuan yang tergolong masih muda dibanding dengan kandidat lainnya saat mencalonkan diri pada Pilihan Legislatif 2019. Dengan profil yang dimiliki Nasha Barcelona, ia berhasil meraup suara

dari masyarakat sebesar 20.722 suara dari Dapil 4, dimana 16.056 suara berasal dari Kecamatan Talun tempat tinggalnya beserta kedua orang tuanya.

2. Marheinis Urip Widodo (Ayah Nasha), merupakan seorang petahana PDIP yang sudah memulai karir politiknya sejak tahun 1998. Dengan pengalamannya yang hampir 22 tahun lamanya membuat Marheinis menjadi politisi paling lama dan berpengalaman dibanding dengan politisi lainnya yang berada di Kabupaten Blitar. Marheinis yang merupakan politisi dari PDIP selalu mendapatkan perolehan suara tertinggi selama ia menjabat sebagai DPRD maupun Kepala Daerah. Basis massa dari Marheinis berada di Kecamatan Talun terutama Desa tempat tinggalnya yaitu Bendosewu. Selain terkenal sebagai politisi yang selalu memenangkan perolehan suara tertinggi Marheinis memiliki peran yang penting di DPC PDIP Kabupaten Blitar, yang mana ia telah menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar sebanyak 3 periode hingga kemudian memasukkan anak keduanya Diza Brasillia Marheinis sebagai Wasekbid Internal Partai.
3. Herlangga Toraka (Tim Sukses Nasha), merupakan ranting PDIP yang berada di Desa Jeblog Kecamatan Talun. Herlangga yang sudah mengenal Marheinis (ayah Nasha) sejak lama selalu membantu keluarga Nasha dalam mencari massa pada saat Pemilu maupun Pilkada berlangsung. Sehingga peran Herlangga pada kampanye Nasha Barcelona menjadi bagian dari inti tim sukses yang berjumlah 14 orang, dengan menghandle 14 Desa yang berada di Kecamatan Talun.

Informan ini dipilih sesuai dengan perannya dalam mendukung peningkatan elektabilitas Nasha dan pengumpulan data peneliti.

1.7.5 Prosedur Pengumpulan Data

Pada berlangsungnya penelitian, peneliti memerlukan adanya data yang digunakan sebagai pelengkap ataupun akhir dari penelitian. Sehingga untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data yaitu :

1.7.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu prosedur pengumpulan data yang digunakan para peneliti dengan metode kualitatif. Wawancara merupakan interaksi antara pewawancara (peneliti) dengan informan (yang diwawancarai) secara langsung. Dimana pewawancara langsung bertanya kepada informan secara face to face mengenai obyek permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian informan yang menjadi pusat wawancara adalah Anggota DPRD Kabupaten Blitar Nasha Barcelona, ayah Nasha Barcelona (Marheinis) serta tim sukses Nasha (Herlangga) yang mendukung meningkatkan elektabilitas Nasha di pilihan Legislatif. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada informan yang bersangkutan untuk mengetahui secara mendalam opini para informan. Wawancara yang akan dilakukan, sebelumnya sudah dipersiapkan oleh peneliti sebuah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan di jawab oleh informan dimana informan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara langsung. Wawancara ini diharapkan untuk mendapatkan fakta-fakta dari jawaban informan mengenai pertanyaan yang diajukan yang dapat digunakan oleh peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Selain itu dengan beberapa akses yang dimiliki oleh penulis untuk melakukan wawancara terhadap Nasha Barcelona, Marheinis, hingga Herlangga secara langsung mempermudah mendapatkan waktu, tanpa harus menunggu perizinan. Dengan begitu jejaring kekerabatan keluarga yang dimiliki penulis juga merupakan jaringan politik dari keluarga Nasha Barcelona.

1.7.5.2 Dokumentasi

Salah satu yang khas dari proses pengumpulan data adalah dokumentasi dimana peneliti mendapatkan data dari KPU, dprd.id, Website, buku, jurnal, referensi penelitian terdahulu hingga media social Nasha Barcelona yang berisi kegiatan politiknya sebelum hingga setelah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Blitar. Foto bersama dengan informan ataupun beberapa tempat dan data untuk dijadikan bukti serta keabsahan dari penelitian. Dokumentasi ini sebagai alat yang memperkuat proses pengumpulan data, yang kelak dapat membantu focus penelitian.

1.7.6 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang ingin di kumpulkan adalah data primer dan sekunder. Dalam perolehan fakta data yang dikumpulkan berupa data primer dimana data tersebut langsung diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Nasha Barcelona,

ayah Nasha (Marheinis) serta tim sukses (Herlangga). Data primer berupa hasil dari wawancara untuk mengetahui bagaimana Nasha Barcelona memanfaatkan jaringan keluarga untuk memobilisasi massa yang berada di Dapil 4. Sedangkan pada perolehan data sekunder di dapatkan melalui berbagai studi pustaka atau literatur terdahulu berupa buku mengenai mobilisasi politik, jurnal jejaring keluarga, data KPU berupa perolehan suara sebesar 20.722 dari Dapil 4 yang terdiri dari 4 Kecamatan, website mengenai profil anggota DPRD Kabupaten Blitar dan media social Nasha berupa kegiatan politik yang dilakukannya.

1.7.7 Proses Analisis Data

Prosedur analisis data ini bertujuan untuk menyusun data secara sistematis sehingga data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian dan dapat dipahami dengan mudah. Pada dasarnya proses analisis data ini menjadikan hasil data secara terstruktur, teratur dan memiliki makna sesuai dengan judul yang diambil. Proses analisis data ini dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara, mencari dan menyisipkan dokumentasi mengenai Mobilisasi Politik Elektoral Berbasis Jaringan Keluarga : Studi Kasus Nasha Barcelona Marheinis Pada Pilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Blitar. Menurut Miles & Huberman, 1992 teknik analisis data dapat dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi data. Tiga Teknik tersebut sebagai hal berikut :

1. Reduksi data

Merupakan bentuk analisis data untuk menajamkan hal-hal yang dianggap sangat penting, mengorganisasikan dan menggolongkan data agar tersusun secara sistematis dan dengan mudah membuat simpulan yang lebih bermakna. Reduksi data ini diperoleh melalui wawancara penulis dengan informan, dan dokumentasi yang kemudian dikumpulkan dan digolongkan agar tidak menghilangkan makna atau nilai dari data tersebut.

2. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan penarikan adanya kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan. Proses ini menggolongkan seluruh kelompok data untuk lebih mudah dipahami. Dimana pada penelitian kualitatif data yang dihasilkan berupa teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini, data dapat menggambarkan peran jejaring keluarga atau kekerabatan Nasha Barcelona dalam memobilisasi massa untuk memilihnya.

3. Kumpulan dan verifikasi data

Data yang sudah disusun berdasarkan pemfokusan, penggolongan dan penyusunan secara sistematis kemudian disimpulkan dengan tujuan penelitian. Namun terkadang kesimpulan tersebut masih bersifat sementara, karena untuk mendapatkan kesimpulan yang mendalam harus dilakukan pengujian data lanjutan mengenai focus penelitian yaitu mobilisasi politik electoral berbasis jaringan keluarga pada Pilihan Legislatif Nasha Barcelona. Sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami proses maupun hasil penelitian.